

**APBD – 2007**

**PERDA KOTA CILEGON NO. 1 TAHUN 2007**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN  
ANGGARAN 2007**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; serta dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cilegon dengan DPD Kota Cilegon pada tanggal 14 November 2006; perlu menetapkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2007.
  - Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 8 Tahun 2006

tentang Pelapora Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Perda Kota Cilegon; Perda Kota Cilegon No. 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2010; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon; Perda Kota Cilegon No. 16 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon Tahun 2006 – 2010.

- Perda ini mengatur tentang:  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari :
  1. Pendapatan Daerah
  2. Belanja Daerah
  3. Surplus/(Defisit)
  4. Pembiayaan Daerah

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Cilegon pada 8 Januari 2007.

**BPKD - SOTK**

**PERDA KOTA CILEGON NO. 2 TAHUN 2007**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KOTA CILEGON**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta untuk memudahkan koordinasi dan manajemen pengelolaan keuangan Daerah, perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah serta menyusun Organisasi dan Tata kerjanya dengan peraturan daerah;
  - Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UU Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Perda; Perda Kota Cilegon No. 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2006;
  - Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
4. Organisasi;
5. Bidang Tugas Organisasi;
6. Tata Kerja;
7. Kepegawaian;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan lain-lain;
11. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Cilegon pada 28 Maret 2007.

**BKD - SOTK**

**PERDA KOTA CILEGON NO. 3 TAHUN 2007**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA  
CILEGON**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34A UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian; serta untuk meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dengan Perda tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Cilegon dengan peraturan daerah;

- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Perda; Perda Kota Cilegon No. 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2006.

- Perda ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  4. Organisasi;
  5. Bidang Tugas Organisasi;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepegawaian;
  8. Pembiayaan;
  9. Ketentuan Peralihan;
  10. Ketentuan lain-lain;
  11. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Ditetapkan di Cilegon pada 28 Maret 2007.



**BAKESBANGLINMASPOL - SOTK**

**PERDA KOTA CILEGON NO. 4 TAHUN 2007**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK KOTA CILEGON**

- ABSTRAK** :
- bahwa Perda No. 15 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban yang menjadi dasar hukum keberadaan bidang Kesbang dan Linmas tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan; serta dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta organisasi politik dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kota Cilegon;
  - Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi; Perda Kota Cilegon No. 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2006.
  - Perda ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pembentukan;
    3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
    4. Organisasi;
    5. Bidang Tugas Organisasi;
    6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan lain-lain;
11. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Cilegon pada 28 Maret 2007.

**SETDA - SOTK**

**PERDA KOTA CILEGON NO. 5 TAHUN 2007**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CILEGON**

- ABSTRAK** : - bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang diatur dengan Perda No. 8 Tahun 2006 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan; serta dengan terbentuknya Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dimaksud dengan membentuk peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cilegon;
- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Perda

Kota Cilegon No. 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2006.

- Perda ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  3. Organisasi;
  4. Bidang Tugas Organisasi;
  5. Tata Kerja;
  6. Ketentuan Peralihan;
  7. Ketentuan lain-lain;
  8. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Ditetapkan di Cilegon pada 28 Maret 2007.

**PELABUHAN - PEMBANGUNAN**

**PERDA KOTA CILEGON NO. 6 TAHUN 2007**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBANGUNAN  
PELABUHAN KOTA CILEGON**

- ABSTRAK** : - bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab; untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan penggalian potensi daerah; serta dalam rangka memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki, dan upaya mengantisipasi globalisasi serta perdagangan bebas dipandang perlu pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan untuk kepentingan umum yang representatif yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Dasar Hukum: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya; UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Diatasnya; UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam

Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat ; Perda Kota Cilegon No. 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon; Perda Kota Cilegon No. 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon; Perda Kota Cilegon No. 16 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cilegon Tahun 2006 – 2010; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2007.

- Perda ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Lokasi Pembangunan Pelabuhan;
  4. Pelaksanaan Pembangunan;
  5. Pembiayaan;
  6. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Cilegon pada 22 April 2007.



## **KELURAHAN**

### **PERDA KOTA CILEGON NO. 7 TAHUN 2007**

**2007**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG KELURAHAN**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah salah satunya kelurahan; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk peraturan daerah tentang Kelurahan;

;

- Dasar Hukum: UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan; Perda Kota Cilegon No.11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon

sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2006; Perda Kota Cilegon No. 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

- Perda ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan Kelurahan;
  3. Kedudukan Tugas dan Fungsi;
  4. Susunan Organisasi;
  5. Tata Kerja;
  6. Keuangan;
  7. Lembaga Kemasyarakatan;
  8. Pembinaan dan Pengawasan;
  9. Ketentuan Peralihan;
  10. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Cilegon pada 23 Juli 2007.

**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**PERDA KOTA CILEGON NO. 8 TAHUN 2007**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya penggalan potensi ekonomi melalui Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

;

- Dasar Hukum: UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kota Cilegon No. 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang

Daerah; Perda Kota Cilegon No. 18 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2007.

- Perda ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Penyertaan Modal Daerah;
  4. Hak Mewakili;
  5. Hasil Usaha;
  6. Pengawasan;
  7. Ketentuan Peralihan;
  8. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Cilegon pada 25 Juli 2007.

**PERHITUNGAN APBD TA 2006**

**PERDA KOTA CILEGON NO. 9 TAHUN 2007**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2006**

**ABSTRAK** : - bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

; - Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; PP

No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Perda Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Perda Kota Cilegon; Perda Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2010; Perda Kota Cilegon Nomor 22 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005; Perda Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Cilegon Tahun 2001 - 2005; Perda Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; Perda Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

- Perda ini mengatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, yang lebih rinci tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan APBD;
2. Lampiran II : Laporan Sisa Perhitungan APBD;
3. Lampiran III : Rincian Perhitungan APBD;
4. Lampiran IV : Laporan Aliran Kas;
5. Lampiran V : Neraca Daerah



- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Ditetapkan di Cilegon pada 27 Juli 2007.